

**EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN AGRIBISNIS SEKTOR KELAPA SAWIT
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI KELAPA SAWIT
(STUDI KASUS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP KRAKATAU)**

OLEH :

HOTNASARI MUTIARA SIREGAR

NIM.26133011



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017/1438 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotnasari Mutiara Siregar
NIM. : 26.13.3.011
Tempat/Tgl. Lahir : Padangsidempuan/ 12 Maret 1995
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Kenari Blok VI no. 17 Medan Estate

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektifitas Pembiayaan Agribisnis Sektor Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Juni 2017

Yang membuat pernyataan

Hotnasari Mutiara Siregar

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Efektifitas Pembiayaan Agribisnis Sektor Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan

Petani Kelapa Sawit

(Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau)

Oleh:

Hotnasari Mutiara Siregar

NIM. 26133011

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 19 Juni 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sugianto, MA
NIP. 19670607 200003 1 003

Fauzi Arif Lubis, SE, MA
NIP. 19841224 201503 1 004

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, MA
NIP. 19760126 200312 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**Efektifitas Pembiayaan Agribisnis Sektor Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah mandiri KCP Krakatau)**". Atas nama Hotnasari Mutiara Siregar, NIM 26133011 program studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 19 Juli 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Islam.

Medan, 19 Juli 2017
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam

Ketua

Sekretaris

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP. 19760818 200710 1 001

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati, MA
NIP. 19790701 200912 2 003

Anggota

Drs. Sugianto, MA
NIP. 19670607 200003 1 003

Fauzi Arif Lubis, SE, MA
NIP. 19841224 201503 1 004

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP. 19760818 200710 1 001

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati, MA
NIP. 19790701 200912 2 003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 19760507 200604 1 002

ABSTRAK

Hotnasari Mutiara Siregar, 2017, Efektifitas Pembiayaan Agribisnis Sektor Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau), Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dibimbing oleh Drs. Sugianto, MA dan Fauzi Arif Lubis, SE, MA.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi bahwa minimnya pembiayaan perbankan syariah di sektor pertanian disebabkan risiko pembiayaan yang tinggi, persyaratan yang ketat dalam pengajuan pembiayaan, kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala mikro-kecil, serta keterbatasan kompetensi perbankan di bidang pertanian. Sehingga yang menjadi tantangannya adalah bagaimana perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaannya secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan PT. Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan sektor kelapa sawit dan sejauh mana efektifitas pembiayaan syariah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri pada sektor kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. *Informan* penelitian yang dipilih adalah pegawai/karyawan PT. Bank Syariah Mandiri yang langsung menangani masalah pembiayaan yaitu pegawai/karyawan bagian *marketing, Consumer Banking Relationship Manager* (CBRM). Subjek lainnya adalah nasabah Bank Syariah Mandiri yang mendapatkan pembiayaan agribisnis khususnya sektor kelapa sawit yaitu sebanyak 3 (tiga) orang nasabah. Proses analisis data dan informasi berlangsung sekaligus pada saat dilakukan pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas melalui reduksi data, *display*, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri adalah minimnya informasi yang diperoleh petani, penyediaan agunan yang sulit dipenuhi nasabah, penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian masih kurang *matching* dengan *nature* usaha di perbankan, Bank Syariah Mandiri belum berani karena sangat berisiko (*high risk*), dan masih terfokus pada agribisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri kepada petani kelapa sawit sudah efektif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan memiliki pengaruh positif terhadap nasabah, terbukti dengan meningkatnya jumlah pendapatan petani kelapa sawit. Selain itu juga dapat dilihat dengan bertambahnya luas lahan yang dimiliki petani kelapa sawit.

Kata kunci: Efektifitas Pembiayaan Agribisnis, dan Pendapatan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. atas nikmat yang telah diberikan baik berupa nikmat kesehatan ataupun nikmat kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah meletakkan peradaban kemanusiaan yang diridhoi Allah SWT. Penulisan skripsi yang berjudul “Efektifitas Pembiayaan Agribisnis Sektor Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau)” disusun berdasarkan pengalaman penulis selama mengikuti magang di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran serta bimbingan yang membangun sangat diharapkan demi penulisan skripsi yang lebih baik lagi.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Binis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan pembimbing akademik.
3. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Sugianto, MA selaku pembimbing I dan dan Fauzi Arif Lubis, SE, MA. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
5. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Ekonomi Dan Binis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam perkuliahan.
6. Kepada Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau dan CBRM selaku pembimbing Bank Syariah Mandiri.
7. Yang teristimewa atas kesempurnaan cinta dari Allah SWT, penulis ucapkan terima kasih dan penghormatan sebanyak-banyaknya kepada Ibunda Dra. Hj. Syarifah Murni Harahap yang begitu tulus dan ikhlas memberikan kasih sayang, do'a, semangat dan

pengorbanan baik secara moril maupun material selama perkuliahan dan penulisan skripsi kepada saya juga kepada almarhum ayah.

8. Untuk yang tersayang Abang-abang dan kakak-kakak juga adik saya, yang selalu memberikan motivasi, nasihat, inspirasi, dan do'a kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat-sahabat terkasih, teman-teman seperjuangan Ekonomi Perbankan Syariah-A (EPSA), terima kasih atas kebersamaannya yang singkat pada 2013-2017, maupun diluar kampus yang dengan ikhlas memberikan do'a dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat terus berusaha untuk menjadi lebih baik.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak, semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. semoga skripsi ini berguna bagi agama, bangsa dan negara, khususnya bagi penulis sendiri.

Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Juni 2017

Penulis

Hotnasari Mutiara Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
 BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Landasan Teori	7
1. Efektifitas	7
2. Pembiayaan	16
3. Agribisnis	27
4. Pendapatan	30
B. Kerangka Pemikiran	37
C. Penelitian Terdahulu	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Subjek penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Analisis Data	43
 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Temuan Penelitian	
1. Gambaran Umum Perusahaan	46
2. Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Mandiri pada Sektor Kelapa Sawit	48
3. Tantangan Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Mandiri pada Sektor Kelapa Sawit	51
4. Efektivitas Pembiayaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Sawit	52
5. Mekanisme Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Mandiri pada Sektor Kelapa Sawit	54
B. Pembahasan Penelitian	57
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Table	Halaman
1. Tabel 1.1 Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten, 2014.....	3
2. Tabel 4.1 Persentase Pendapatan Setelah Pembiayaan	53

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Halaman
1. Gambar 2.1 Sistem agribisnis	29
2. Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran.....	38
3. Gambar 4.1 Skema <i>Murabahah wal Wakalah</i>	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang berperan sebagai sumber utama pangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor ini akan terus menjadi sektor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional dan penerimaan ekspor serta berperan sebagai produsen bahan baku untuk penciptaan nilai tambah di sektor industri dan jasa. Sektor agribisnis kelapa sawit dapat juga dikatakan sebagai lokomotif perekonomian Indonesia karena daya dukung lahan yang memadai ditambah dengan bervariasinya produk turunan dari komoditi ini.¹

Kelapa sawit merupakan komoditi andalan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan minyak sawit dunia. Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber devisa non migas bagi Indonesia. Minyak kelapa sawit yang dapat difungsikan sebagai bahan bakar biodisel, selain itu juga bahan bakar nabati yang dihasilkan kelapa sawit ini dapat menggantikan bahan bakar minyak sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Propek cerah dari industri kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati di dunia membuat Indonesia terus memperluas pengembangan areal perkebunan kelapa sawit.²

Dari data sensus pertanian Badan Pusat Statistik tahun 2014, luas tanaman kebun kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 417.838,00 Ha meningkat dari

¹Dupien Asido Marganti, *Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan*, <http://www.pascasarjanapwd.co.id>, (Diakses pada 18 Desember 2016)

² Eni Ariyanti, *Sumatera Utara Salah Satu Penghasil Terbesar Kelapa Sawit Indonesia*, <http://beritadaerah.co.id>, (Diakses pada 2 Februari 2017)

tahun 2010 yang jumlahnya 394.656,96 Ha. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara tersebar di beberapa wilayah seperti yang tertera pada tabel 1.1.³

Tabel 1.1 menunjukkan luas tanaman dan jumlah produksi kelapa sawit menurut kabupaten di Sumatera Utara. Luas tanaman dan jumlah produksi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani ditambah dengan keahlian.

Dengan berkembangnya perbankan syariah atau lembaga pembiayaan syariah diharapkan dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat terutama kalangan menengah kebawah. Hal ini didasari dari pendirian perbankan syariah yang bertumpu pada perekonomian di sektor riil serta tujuannya sebagai perbankan investasi yang berkeadilan. Salah satu kegiatan ekonomi sektor riil yang diharapkan dapat menggunakan pembiayaan syariah adalah sektor pertanian. Beberapa hal yang melatarbelakangi adalah sektor pertanian masih memainkan peran sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini tetap menjadi andalan sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian 40% dari penduduk Indonesia, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa negara, serta pemasok bahan baku sekaligus pasar bagi sektor industri. Bahkan, ada peran sektor pertanian yang tidak mungkin digantikan sektor lain yaitu sebagai sumber bahan pangan.⁴

³ *Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten, 2014*, <http://sumut.bps.go.id>, (diakses pada 20 Desember 2016)

⁴ Ryan Rahmadi, *Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia*, <http://www.ryanrahmadi99.co.id>, (Diakses pada 3 Februari 2017)

Tabel 1.1 Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten, 2014					
Kabupaten/Kota	Luas Tanaman (ha)				Produksi TBS
	T B M	T M	T T M	Jumlah	(ton)
Kabupaten					
1. N i a s	-	-	-	-	-
2.Mandailing Natal	4 210,00	11 985,00	23	16 218,00	49 625,00
3. Tapanuli Selatan	2 202,00	2 945,00	35	5 182,00	12 325,00
4 .Tapanuli Tengah	1 602,00	1 677,00	34	3 313,00	6 225,00
5. Tapanuli Utara	10	13	11	34	18
6. Toba Samosir	145	512	11	668	829
7. Labuhanbatu	2 785,00	31 845,00	82	34 712,00	123 625,00
8. A s a h a n	7 018,00	66 222,00	1 592,00	74 832,00	172 591,00
9. Simalungun	3 385,00	25 585,00	70	29 040,00	114 100,00
10.D a i r i	37	118	16	171	300
11.K a r o	586	795	12	1 393,00	1 900,00
12.Deli Serdang	2 7096,00	11 784,00	86	14 666,00	42 762,00
13.L a n g k a t	6 300,00	39 570,00	421	46 291,00	146 521,00
14.Nias Selatan	670	26	5	701	32
15.Humbang Hasundutan	52	180	25	257	150
16.Pakpak Bharat	143	1 168,00	83	1 394,00	1 191,00
17.Samosir	-	-	-	-	-
18.Serdang Bedagai	1 945,00	10 706,00	35	12 686,00	40 885,00
19.Batu Bara	2 258,00	6 272,00	370	8 900,00	24 685,00
20.Padang Lawas Utara	9 365,00	17 529,00	120	27 014,00	68 421,00
21.Padang Lawas	7 000,00	25 830,00	80	32 910,00	101 000,00
22.Labuhanbatu Selatan	1 762,00	40 170,00	608	42 540,00	142 421,00
23.Labuhanbatu Utara	4 632,00	59 660,00	624	64 916,00	192 222,00
24.Nias Utara	-	-	-	-	-
25.Nias Barat	-	-	-	-	-
Kota					
78. Gunungsitoli	-	-	-	-	-
Sumatera Utara 2014	58 903,00	35 4 592,00	4 343,00	417 838,00	1 241 828,00
2013	62 522,00	327 580,00	3 888,00	393 990,00	6 735 795,45
2012	63 213,86	343 849,70	3 336,86	410 400,42	5 197 209,32
2011	58 550,03	343 669,58	3 579,73	405 799,34	5 428 535,14
2010	56 866,02	335 140,99	2 649,95	394 656,96	5 084 166,83
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2014					

Keterangan: TBM (Tanaman Belum Menghasilkan), TM (Tanaman Menghasilkan), TTM Tanaman Tidak Menghasilkan, TBS (Tandan Buah Segar)

Walaupun demikian, sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya kurangnya permodalan petani dan pelaku usaha pertanian. Perbankan nasional, secara teori memiliki potensi besar sebagai pendukung pembiayaan pertanian karena secara legal formal merupakan lembaga intermediasi keuangan. Namun, fakta menunjukkan penyaluran kredit perbankan nasional ke sektor pertanian masih sangat kecil yaitu di bawah 6 persen.⁵

Untuk perbankan syariah, hasil studi menunjukkan bahwa minimnya pembiayaan di sektor pertanian disebabkan beberapa hal, diantaranya: risiko pembiayaan yang tinggi, persyaratan yang ketat dalam pengajuan pembiayaan, kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala mikro-kecil, serta keterbatasan kompetensi perbankan di bidang pertanian. Sehingga yang menjadi tantangannya adalah bagaimana perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaannya secara efektif.

Pemerintah sendiri telah berupaya untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor pertanian, diantaranya dengan memperbesar alokasi anggaran ke sektor pertanian, peningkatan efektivitas dana APBN, mendorong perbankan lebih ekspansif dalam pembiayaan pertanian, maupun merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian tentang efektifitas pembiayaan agribisnis kelapa sawit dalam meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit pada PT. Bank Syariah Mandiri menarik untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Pembahasan yang akan dilakukan penulis dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tantangan PT. Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan sektor kelapa sawit?

⁵BI Perlu Ada Skim Khusus Untuk Kredit Pertanian, <http://www.carikredit.com>, (Diakses pada 27 April 2017)

2. Apakah pembiayaan syariah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri pada sektor kelapa sawit sudah berjalan efektif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Memahami efektifitas pembiayaan agribisnis yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan terhadap sektor perkebunan.
- b. Tercapainya salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Secara spesifik manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah menambah literatur keilmuan tentang pembiayaan pada sektor pertanian, serta tercapainya salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

b. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya berkaitan dengan pengembangan dan program pemberdayaan penelitian (*research and development*).

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan yang berguna dalam memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Efektifitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti akibat, pengaruh yang dapat membawa hasil⁶. Efektifitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Istilah Ekonomi, efektivitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan seberapa jauh sasaran (target) tercapai⁷.

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya⁸. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Amin Widjaja, efektivitas adalah berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan yang telah ditetapkan tercapai. Sementara itu, Tjukir P. Tawat mengatakan bahwa efektifitas adalah kemampuan suatu unit kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Hasan Sadili, efektivitas bermakna menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha

⁶ DEP. DIK. NAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ke IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), h.381.

⁷ Ety Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.71.

⁸ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 24.

dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti⁹.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.

b. Kriteria Penilaian Efektivitas

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu strategi/perencanaan tersebut berjalan secara efektif, yaitu mencakup¹⁰:

- 1) Berhasil guna, untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- 2) Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu, maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lain telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- 3) Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- 4) Pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, dan waktu yang tersedia.
- 5) Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.

⁹Thata, *Kumpulan Teori Efektifitas*, <http://yunitaardha.co.id>, (Diakses pada 11 oktober 2016)

¹⁰ Sujadi, *Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen* (Jakarta:CV. Masagung,1990), cet ke III, h. 36-39

- 6) Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis. Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.

Adapun menurut T. Hani Handoko, beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektifitas perencanaan, yaitu mencakup¹¹:

- 1) Kegunaan; agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.
- 2) Ketepatan dan objektivitas; rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jenis, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.
- 3) Ruang lingkup; perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (*comprehensiveness*), kepaduan (*unity*) dan konsistensi.
- 4) Efektivitas biaya; efektivitas biaya perencanaan dalam perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.
- 5) Akuntabilitas; ada dua aspek perencanaan:
 - a) tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan
 - b) tanggung jawab atas implementasi rencana. Suatu perencanaan harus mencakup keduanya.
- 6) Ketepatan waktu; berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

Adapun kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:¹²

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan

¹¹ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta:BPFE, 2012), Edisi 2 cet 23, h. 103-105

¹² Sondang P Siagian, *Produktivitas Kerja*, h. 77

tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

c. Mengukur Efektivitas

Adapun pendekatan untuk mengukur efektivitas yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni:¹³

- 1) Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan

¹³ Martani Husaeni dan Hari Lubis, *Teori Organisasi*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial, 1987), h. 55

mengutamakan adanya keberhasilan untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Richard M. Steers mengemukakan 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas yaitu:¹⁴

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah

¹⁴ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 53

sebagai berikut:

- 1) Adanya tujuan yang jelas,
- 2) Struktur organisasi,
- 3) Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,
- 4) Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektifitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas.

Richard M Steers menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:¹⁵

1) Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2) Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam

¹⁵ Ibid., h. 209

lingkungan organisasi.

3) Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

4) Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model, yaitu :¹⁶

1) Model Optimasi Tujuan

Penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi.

2) Perspektif Sistem

Memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berbeda didalam maupun yang berada diluar organisasi. Sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.

¹⁶ *Ibid.*, h. 208

3) Tekanan Pada Perilaku

Efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi. Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar. Berdasarkan pengertian-pengertian efektivitas yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut pembiayaan.

Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, dan ketidakjujuran dari satu pihak ke pihak lain. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para deposan atau pembebanan suatu bunga dari nasabah tidak ada.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefiisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁷

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005) h. 260

Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹⁸

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:²⁰

1) Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :

- a) Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang yang akan diperdagangkan dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama 1 tahun, serta keperluan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.
- b) Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / inventaris.
- c) Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yaitu pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.160

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2015), h. 135

- d) Pembiayaan multiguna, yakni pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang tidak termasuk kedalam kategori modal kerja ataupun konsumtif. Pembiayaan multiguna ini merupakan jalan tengah untuk permasalahan pembiayaan yang tidak termasuk keduanya, dapat berupa pembiayaan untuk pendidikan, pembelian alat-alat kesehatan, renovasi rumah, dll.
- e) Pembiayaan sektor pertanian, yaitu bank dapat menyediakan dana dengan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan membeli bibit, pupuk, pemeliharaan sampai petani panen dan hasilnya terjual.

2) Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:

- a) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
- b) Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
- c) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

3) Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu:

- a) *Efektif*, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
- b) *Flat*, yakni angsuran pokok dan *margin* merata untuk setiap periode.
- c) *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*).

4) Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam :

- a) Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun
- b) Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun
- c) Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

- d) Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan

5) Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai :

- a) Pembiayaan sektor perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung sembako dll.)
- b) Pembiayaan sektor industri (contoh : *home industry*; konfeksi, sepatu)
- c) Pembiayaan konsumtif, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh : motor, mobil dll.)

6) Pembiayaan Berdasarkan Syariah Islam

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perbankan syariah disebutkan bahwa penyaluran dana (pembiayaan) yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah melalui:²¹

a) Transaksi berdasarkan prinsip jual beli:

- (1) *Murabahah* adalah kepemilikan objek jual-beli dengan jual-beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba
- (2) *Istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
- (3) *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

b) Transaksi berdasarkan prinsip sewa menyewa:

- (1) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang/jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

²¹ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21

(2) *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan di tangan penyewa.

c) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil:

(1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

(2) *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

d) Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jasa:

(1) *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Harta tersebut memiliki nilai ekonomis.

(2) *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan.

(3) *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

(4) *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung.

Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan bank syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.²²

c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian,

²² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), h. 87

dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi juga distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.²³

Pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Berikut beberapa fungsi pembiayaan:²⁴

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* (dana yang belum digunakan).
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Sedangkan tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:

- 1) Mencari keuntungan (*profitability*) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.
- 2) *Safety* atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
- 3) Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
- 4) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

²³ Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009), h. 68

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Group, 2011), h. 26

d. Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Dalam dunia perbankan pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C atau “*the five C’s principles*”.

Prinsip-prinsip 5C tersebut antara lain:

- 1) ***Character*** adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.
- 2) ***Capacity*** merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.
- 3) ***Capital*** adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
- 4) ***Collateral*** adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.

- 5) **Condition**, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

e. Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir, unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan, antara lain:²⁵

1) Kepercayaan

Adanya keyakinan dari pihak bank atas presentasi yang diberikannya kepada nasabah peminjaman dana yang akan dilunasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2) Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan pembiayaan yang telah di sepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun risiko yang tidak disengaja.

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 98

5) Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi pembiayaan merupakan keuntungan bank.

Dari uraian-uraian pengertian pembiayaan di atas, maka dapat diketahui pengertian pembiayaan secara yuridis adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dengan sistem bagi hasil.

Sedangkan unsur-unsur pembiayaan menurut Susiana adalah sebagai berikut :²⁶

1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan sehingga tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang diadakan akan batal demi hukum.

2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai

²⁶ Susiana, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Malang*. (Skripsi, UIN Malang, 2010)

kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3) Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

3. Agribisnis

a. Pengertian Agribisnis

Pengertian agribisnis dapat dijelaskan dari unsur kata yang membentuknya yaitu “agri” yang berasal dari kata *agriculture* (pertanian) dan “bisnis” yang berarti usaha. Jadi “agribisnis” adalah usaha dalam bidang pertanian. Baik mulai dari produksi, pengelolaan, pemasaran, atau kegiatan lain yang berkaitan.

Menurut Sjarkowi dan Sufri, agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi pengusahaan input pertanian dan atau pengusahaan pengelolaan hasil pertanian. Sedangkan menurut Austin, agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usahatani, pengolahan bahan makanan, usaha sarana dan prasarana produksi pertanian, transportasi, perdagangan, kestabilan pangan dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk distribusi bahan pangan dan serat-seratan kepada konsumen.²⁷

b. Sistem Agribisnis

Sistem agribisnis merupakan kesatuan atau kumpulan dari elemen agribisnis yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama, menggunakan input dan mengeluarkan output produk agribisnis melalui pengendalian proses yang telah direncanakan.

Secara konseptual sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktifitas, mulai dari pengadaan

²⁷ *Pengertian Agribisnis Menurut Para Ahli*, <http://www.nasrulartaanato-bratnisji.co.id>, (Diakses pada 30 Maret 2017)

dan penyaluran sarana produksi sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usahatani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yaitu:²⁸

1) Subsistem Agribisnis Hulu

Meliputi pengadaan sarana produksi pertanian antara lain bibit, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit, dan peralatan produksi pertanian.

2) Subsistem Usahatani/Produksi

Kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Termasuk dalam subsistem ini adalah usaha tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, tanaman obat-obatan dan tanaman hortikultura.

3) Subsistem Agribisnis Hilir

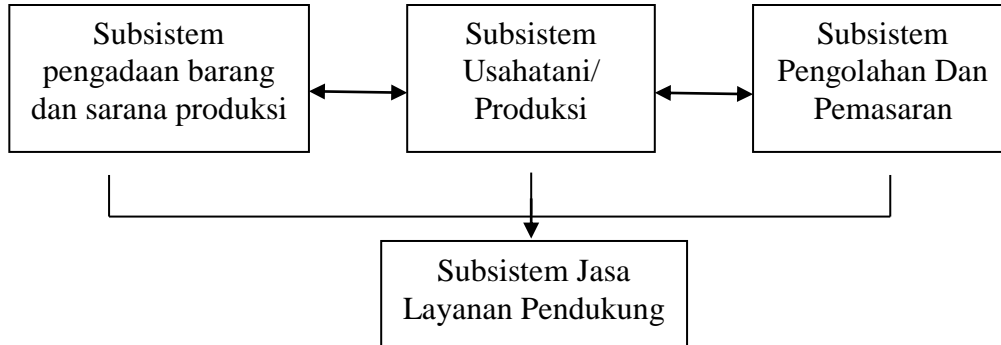
Dalam subsistem ini terdapat rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan produk usahatani, mengolah produk primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir dan pendistribusian.

4) Subsistem Jasa Layanan

Subsistem jasa layanan agribisnis adalah semua jenis lembaga yang mendukung dan mengembangkan subsistem hulu, subsistem usahatani, dan subsistem hilir. Lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan ini adalah penyuluhan, konsultan, keuangan dan penelitian.

²⁸ *Pengertian Sistem Agribisnis*, <http://www.klikbbm.co.id>, (Diakses tanggal 30 Maret 2017)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Sistem agribisnis

Subsistem-subsistem tersebut saling berkaitan satu sama lain. Subsistem agribisnis hulu membutuhkan umpan balik dari subsistem usahatani agar dapat memproduksi sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan budidaya pertanian. Sebaliknya, keberhasilan pelaksanaan operasi subsistem usahatani bergantung pada sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hilir. Selanjutnya, proses agribisnis hilir bergantung pada pasokan komoditas primer yang dihasilkan oleh subsistem usahatani. Subsistem jasa layanan pendukung, seperti telah dikemukakan, keberadaannya tergantung pada keberhasilan ketiga subsistem lainnya.

4. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi dalam Bentuk upah (*wages*), gaji (*solaris*), sewa (*rent*), bunga (*interest*), komisi (*komisionis*), ongkos (*fee*), dan laba (*profit*) bersama dengan bantuan, tunjangan pensiun, lanjut usia dan lain-lain.²⁹

Sementara di dalam akuntansi pendapatan menyatakan pencapaian atau hasil dan biaya yang mempersentasekan upaya, dimana konsep upaya dan hasil mempunyai implikasi bahwa pendapatan dapat tercipta karena pendapatan timbul adanya peristiwa atau transaksi pada saat tertentu, dan bukan karena

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 265

proses selama satu periode.³⁰

Menurut Sukirno pendapatan pribadi dapat diartikan semua jenis pendapatan termasuk pendapatan diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara, atau dengan kata lain bahwa pendapatan adalah jumlah harta kekayaan periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode bukan hanya yang dikonsumsi.³¹ Selanjutnya menurut Mankiw pendapatan seseorang adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bukan perusahaan. Sedangkan dalam pengertian lain pendapatan seseorang adalah pendapatan yang tersisa dalam rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan setelah semua kewajiban mereka kepada pemerintah dibayar, yang pendapatannya ini sama dengan pendapatan perorangan dikurangi pajak, dan pembayaran non pajak lainnya.³²

Dengan demikian dapat disimpulkan pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima sebagai balasan jasa terhadap pekerjaan yang dilakukan dan diterima pada setiap akhir periode tertentu sehingga dapat dikatakan tinggi rendahnya pendapatan seseorang tergantung keterampilan, keahlian dan luasnya kesempatan kerja, serta besarnya modal yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan.³³

b. Sumber Pendapatan

Menurut Sumardi (dalam Riningsih) pendapatan yang diterima seseorang berasal dari berbagai sumber pendapatan yaitu :³⁴

1) Pendapatan sektor formal, yaitu pendapatan yang bersumber dari upah atau gaji yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan.

³⁰ Suardjono, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 6

³¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.6

³² Mankiw, *Principle of Economic*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 9

³³ Eko P. Pratomo, *Berwisata Kedunia Investasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 7

³⁴ Riningsih, "Pengaruh Modal Kerja Dan Satuan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pada Industri Kecil Pengrajin Genteng Di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Semarang, 2005)

2) Pendapatan sektor informal, yaitu pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti dagang, tukang dan buruh.

3) Pendapatan sub intern, yaitu pendapatan yang bersumber dari usaha sendiri seperti dari hasil bercocok, hasil dari berternak, hasil dari kebun dan sebagainya.

c. Pendapatan Menurut Hukum Islam

Menurut struktur atas legislasi Islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah *ujrah* (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja.³⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surat Al-Kahf (18) ayat 77:³⁶

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ³⁵ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.”

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang saat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan

³⁵ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zahra, 2008)

³⁶ Q. S. Al-Kahf (18):77

untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.³⁷

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari pendapatan mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar pendapatan para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Oleh karena itu al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat Al-Jaasiyah (45) ayat 22:³⁸

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan

³⁷ Pendapatan Menurut Hukum Islam, <http://www.referensimakalah.com> (Diakses pada 18 Maret 2017)

³⁸ Q. S. Al-Jaasiyah (45): 22

masing-masing tidak dirugikan. Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.³⁹

d. Prinsip Pendapatan

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁴⁰ Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 279:⁴¹

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat ini penjelas atas akibat apabila tidak ditinggalkannya riba, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi manusia yang tidak meninggalkan riba. Mereka yang suka menukar uang dengan uang merupakan pemakan riba dan telah dimaklumkan perang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kegiatan menukar uang dengan uang di sini diartikan seperti seorang pembeli membeli uang dari pedagang uang, lalu si pedagang uang menjualnya dengan nilai uang itu sendiri ditambah dengan keuntungan sejumlah uang yang harus diberikan oleh pembeli.

³⁹ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Gema Insani, 1999)

⁴⁰ Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), h. 361

⁴¹ Q. S Al-Baqarah (2): 279

Jika ada pemimpin yang adil, para pelaku riba disuruh untuk bertaubat. Apabila sisa riba tersebut tidak jadi diambil melainkan hanya harta pokok dari praktik riba tersebut, maka tidak ada dosa bagi orang yang bertaubat dan meninggalkan sisa riba.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pendapatan erat kaitannya dengan produksi, karena peningkatan produksi maka akan meningkat pola pendapatan dan sebaliknya, dan hal yang mempengaruhi tingkat produksi sama juga dengan pendapatan, seperti tanah, lokasi yang strategis, tenaga kerja, sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta keahlian⁴².

Faktor- faktor yang menentukan kemajuan dan peningkatan pendapatan petani yaitu kondisi sumber daya alam, kondisi sumber daya manusia dan kondisi kelembagaan petani.⁴³

Menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:⁴⁴

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Menurut Bintari dan Suprihatin, tinggi rendahnya pendapatan yang diterima seseorang bergantung kepada :⁴⁵

⁴² Muhammad Idris, “ Sistem Bagi Hasil Pada Pertanian Karet Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Roburan Lombang Madina” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SU, 2016), h. 27

⁴³ Siti Nurrohmah, “Analisis Produksi dan Pendapatan Petani Sawah di Kecamatan Mowilka Kabupotaen Konawe Selatan” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, 2016), h. 22

⁴⁴ Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 150

⁴⁵ Bintari dan Suprihatin, *Ekonomi dan Koperasi*, (Bandung: Ganesa Exact. 1982), h. 35

1) Kesempatan kerja yang tersedia

Dengan semakin tinggi atau semakin besar kesempatan kerja yang tersedia berarti banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

2) Kecakapan dan keahlian kerja.

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

3) Kekayaan yang dimiliki

Jumlah kekayaan yang dimiliki seseorang juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh.

4) Keuletan kerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan dan keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan.

5) Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap penghasilan yang akan diperoleh.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan TBS kelapa sawit.

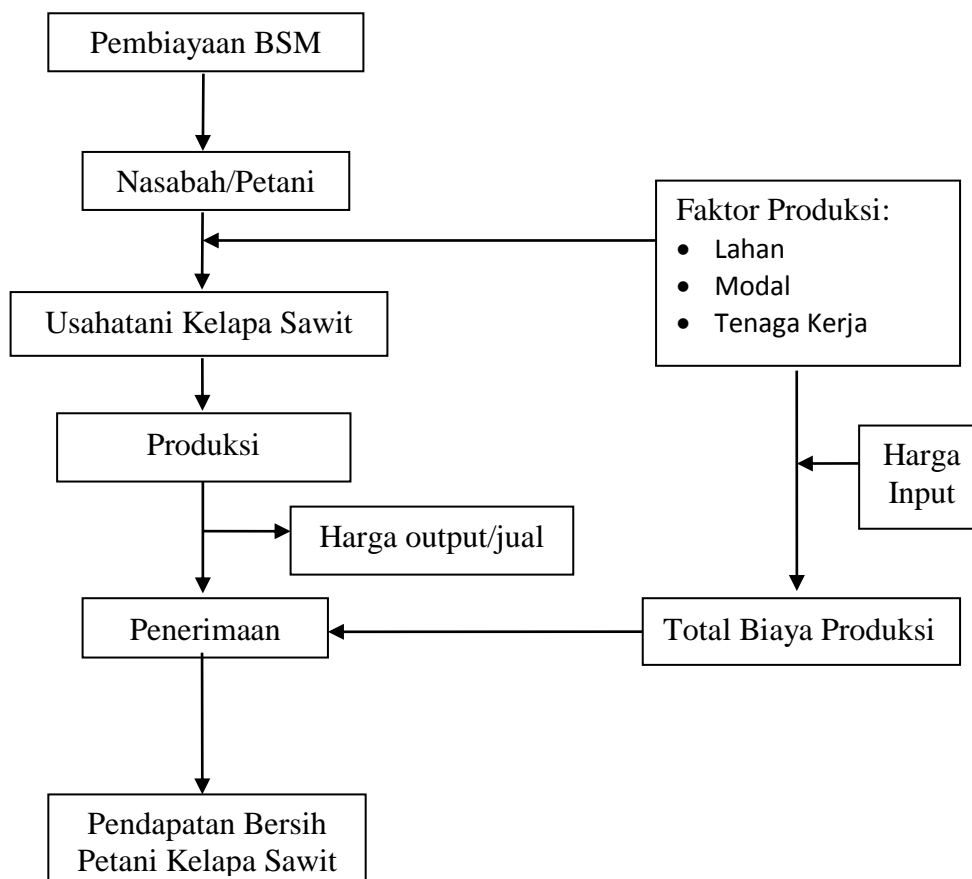
B. Kerangka Pemikiran

Petani dalam mengusahakan usaha taninya menggunakan beberapa faktor produksi seperti lahan, modal baik berupa bibit, pupuk, pestisida dan peralatan, dan tenaga kerja untuk memperoleh hasil dan keuntungan. Dalam usahatani kepemilikan lahan yang merupakan salah satu faktor produksi umumnya sangat mendukung untuk pengembangan usahatani tersebut. Hal ini dikarenakan, semakin luas lahan yang dimiliki oleh petani maka semakin besar potensi petani untuk mengembangkan usahatannya.

Modal juga sangat berperan besar dalam pembiayaan usahatani terutama untuk pengadaan sarana produksi. Modal didalam usahatani biasanya digunakan untuk pembelian berbagai sarana produksi seperti pupuk, pestisida, serta upah tenaga kerja didalam produksi akan sangat berpengaruh pada proses produksi, karena proses produksi akan membutuhkan input produksi berupa fisik kemudian dibayar dalam bentuk uang /upah, yang disebut dengan total biaya produksi.

Dalam usahatani kelapa sawit diperoleh produksi dimana jika dikalikan dengan harga jualnya akan menghasilkan penerimaan petani kelapa sawit, selisih antara penerimaan petani kelapa sawit dengan total biaya usaha kelapa sawit disebut dengan pendapatan petani.

Dapat dilihat dalam skema kerangka pemikiran pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Ibnu Ubaedillah tahun 2011 “efektivitas pembiayaan agribisnis bank syariah dalam pemberdayaan petani (studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat)”. Skripsi ini membahas pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat efektif dalam memberdayakan petani. Kemudian tantangan yang dihadapi standar operasionalnya, PT. Bank Muamalat harus berani menggandeng bapak angkat yang memiliki standar operasionalnya bagus, karena bank tidak memiliki keahlian langsung dalam bidang tersebut. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah (regulasi) terhadap pajak misalnya, harusnya pemerintah pro terhadap sektor ini. Dan berdasarkan parameter transformasi $Y^T = 0,931$ menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat dapat dikatakan efektif.
2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Idris tahun 2016 “ Sistem Bagi Hasil Pada Pertanian Karet Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Roburan Lombang Madina”. Skripsi ini membahas pengaruh bagi hasil terhadap pendapatan petani yang diterapkan petani karet di desa Roburan Lombang Madina. Pola bagi hasil pertanian karet ini memiliki pengaruh yaitu bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan dan masih bisa *saving* untuk keperluan masa depan.
3. Penelitian yang dilakukan Siti sarah anjani “Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Sektor Pertanian Pada KBMT Ibaabdurrahman Ciawi, Bogor, 2013. Skripsi ini membahas efektivitas pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman berdasarkan hasil penilaian responden. KBMT Ibaadurrahman berperan penting dalam pengembangan usaha para nasabah, diantaranya membantu menyediakan permodalan usaha, meningkatkan motivasi berusaha, meningkatkan kesejahteraan nasabah yang dapat dilihat dari peningkatan tabungan, aset rumah tangga, dan skala usaha. Efektivitas pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif.

Nasabah yang diteliti pada skripsi ini adalah petani kelapa sawit yang mendapat pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri. Nasabah tersebut bukan merupakan KUD karena

prosedur pembiayaan yang digunakan adalah bilateral, yaitu Bank Syariah Mandiri menyentuh para petani langsung, tanpa ada agen-agen yang berbentuk KUD, atau bapak angkat. Karena pola yang digunakan bukan intiflasma, kerja sama tiga pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pemaparan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada objek penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Kuncoro, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya akan mengungkapkan fakta-fakta.⁴⁶ Sedangkan menurut Mahi M. Hikmat deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian, sehingga berkehendak mengadakan akumulasi data dasar.⁴⁷ Sementara menurut Moeleng, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.⁴⁸

Menurut Zuriah, penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara akurat dan sistematis mengenai sifat-sifat populasi dan daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dan menguji hipotesis.⁴⁹

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan sejauhmana efektifitas pembiayaan pada sektor kelapa sawit yang dilakukan Bank Syariah Mandiri.

⁴⁶ Kuncoro Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 124

⁴⁷ Mahi M. Hikmat, *Metodologi Penelitian dalam Perspektik Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 44

⁴⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 9

⁴⁹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), h.47

B. Subjek penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian sering disebut sebagai *informan*, yaitu pelaku yang memahami objek penelitian (fokus penelitian). Jadi *informan* yang dimaksud di dalam penelitian adalah orang yang member informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Pada penelitian ini, *informan* sebagai subjek penelitian yang dipilih adalah pegawai/karyawan PT. Bank Syariah Mandiri yang langsung menangani masalah pembiayaan yaitu pegawai/karyawan bagian marketing, *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)*. Subjek lainnya adalah nasabah Bank Syariah Mandiri yang mendapatkan pembiayaan agribisnis khususnya sektor kelapa sawit yaitu sebanyak 3 (tiga) orang nasabah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan dua macam metode, yaitu:⁵⁰

a. Studi dokumentasi, dalam sebuah penelitian lapangan dibutuhkan berbagai data sebagai dokumen pendukung, sehingga metode dokumentasi sangat perlu untuk mencari data yang terkait dengan berbagai hal-hal berupa catatan, buku, majalah, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pemanfaatan pembiayaan dan data-data tentang sejarah lembaga itu sendiri serta data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dengan melihat dokumen serta arsip yang dijadikan objek penelitian yang bersumber dari PT. Bank Syariah Mandiri.

b. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara juga merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau

⁵⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.117

keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan *in-depth interview*. Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanya jawab yang dilakukan langsung dengan subjek penelitian yaitu informan dari PT. Bank Syariah Mandiri dan nasabah yang mendapat pembiayaan agribisnis kelapa sawit.

D. Analisis Data.

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.⁵¹

Proses analisis data dan informasi berlangsung sekaligus pada saat dilakukan observasi dan wawancara, yang ditempuh menurut tahapan yang sistematis serta dapat menjangkau inti permasalahan melalui sebuah proses penelitian. Metode analisis data yang digunakan mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut:⁵²

a. Reduksi data yaitu data yang dirangkum untuk memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskannya pada hal-hal yang penting, dicari tema dalam polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 431-438

b. *Display* data yaitu rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya. Data/informasi yang sudah diolah kemudian disajikan untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu menarik kesimpulan awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokan yakni merupakan validitasnya.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

a. Gambaran Umum Perusahaan

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁵³

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.⁵⁴

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga

⁵³ Profil Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahamandiri.co.id> (Diakses 2 Februari 2017)

⁵⁴ *Ibid.*

menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.⁵⁵

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁵⁶

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.⁵⁷

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁵⁹

b. Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Mandiri pada Sektor Kelapa Sawit

Data pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian termasuk perburuan dan kehutanan posisi akhir Februari 2016 tercatat sebesar Rp 7,83 triliun atau sekitar 3,71% dari total pembiayaan sebesar Rp 211,57 triliun. Perbankan syariah yang memiliki keanekaragaman akad memiliki potensi besar untuk masuk ke dalam sektor usaha pertanian.⁶⁰

Pembiayaan syariah ke pertanian dan perkebunan perlu disubsidi. Subsidi tersebut dinilai dapat melindungi penyaluran pembiayaan perbankan syariah di dua sektor tersebut. Jika instrumen itu ada dan pemerintah mampu memberikan regulasi terhadap instrumen tersebut, maka produk-produk keuangan syariah mudah terserap di pasar dan hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor riil.⁶¹

Langkah strategis tersebut bisa menjadi alat bank syariah untuk lebih fokus pada sektor riil. Pasalnya, selama ini pembiayaan sektor riil belum sepenuhnya dikuasai oleh lembaga keuangan syariah. Meskipun ada, masih terbatas pada jasa dan perdagangan. Pembiayaan pertanian dan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ OJK dorong bank syariah beri pembiayaan pertanian, *keuangan.kontan.co.id* (Diakses pada 1 Mei 2017)

⁶¹ *Pembiayaan Syariah ke Pertanian dan Perkebunan Perlu Disubsidi*, <https://www.syariahamandiri.co.id> (Diakses pada 1 Mei 2017)

perkebunan merupakan sektor riil yang besar, dan pasar belum sepenuhnya dikuasai oleh bank syariah.⁶²

Bank Syariah Mandiri punya komitmen membiayai sektor agribisnis. Namun keterbatasan jaringan menjadi kendala utama BUS dan UUS masuk ke sektor pertanian. Bank Syariah Mandiri serius menggarap sektor agribisnis. Bagi Bank Syariah Mandiri sektor pertanian menjadi salah satu prioritas khususnya untuk segmen UMKM. Jumlah pembiayaan pertanian Bank Syariah Mandiri masih kecil dibandingkan dengan total pembiayaan Bank Syariah Mandiri. Dari total pembiayaan per Januari 2012 yang mencapai Rp 36,5 triliun, sektor pertanian hanya berkontribusi Rp 1,3 triliun. Pembiayaan tersebut tersebar untuk perkebunan dan pertanian. Sebagian besar masih terserap ke perkebunan kelapa sawit.⁶³

Pola pembiayaan Bank Syariah Mandiri untuk sektor perkebunan kelapa sawit selama ini mengandalkan keberadaan perusahaan inti. Perusahaan ini menjadi penjamin keberlangsungan pasar hasil pertanian dari petani. Jika ada perusahaan yang mau membeli produk petani, Bank Syariah Mandiri akan menyalurkan pembiayaan. Pola tersebut dinilainya merupakan cara yang paling efektif untuk menggerakkan pengusaha besar berbagi dengan para petani. Pola tersebut dinamakan *close financial system*, yang diterapkan karena masalah petani bukan hanya akses modal tapi juga perlindungan pasar.⁶⁴

Selain itu, pola pembiayaan melalui perusahaan inti akan memudahkan Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor perkebunan kelapa sawit. Terbatasnya jaringan Bank Syariah Mandiri membuatnya kesulitan untuk mengakses petani hingga ke

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Bank Syariah Komit Biayai Sektor Agribisnis*, <https://www.syariahamandiri.co.id> (Diakses pada 1 Mei 2017)

⁶⁴ *BSM Tambah Pertanian Rp500 M*, <https://www.syariahamandiri.co.id> (Diakses pada 1 Mei 2017)

pelosok. Untuk masuk ke pembiayaan tersebut, bank juga butuh infrastruktur yang lebih banyak. Keberadaan perusahaan inti masih sulit untuk dicari.⁶⁵

Bank Syariah Mandiri akan menambah pembiayaan ke sektor pertanian sebesar Rp500 Miliar. Dengan tambahan itu, ditargetkan pembiayaan pertanian menjadi Rp1,8 triliun. Penambahan pembiayaan ke pertanian itu diakui tidak agresif. Pasalnya, penyaluran pembiayaan ke pertanian dinilai cukup sulit. “Naik Rp500 miliar itu saja sudah bagus karena kita susah mencari perusahaan inti yang menjadi penjamin pembiayaan ke petani-petani,” ungkap Direktur Bisnis Bank Syariah Mandiri Hanawijaya.⁶⁶

c. Tantangan Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Mandiri pada Sektor Kelapa Sawit

Bank Syariah Mandiri telah berdiri selama 17 tahun terbukti dari eksistensinya sebagai sebuah lembaga keuangan yang dinilai mampu mempertahankan posisinya dan mendapat kepercayaan dari seluruh nasabahnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri baik dalam bentuk kegiatan bisnis (pembiayaan) maupun kegiatan sosial ditujukan bagi semua lapisan masyarakat. Namun, peran tersebut nampaknya masih belum dirasakan oleh petani yang membutuhkan modal untuk meningkatkan pendapatan maupun skala usahanya. Hal ini terbukti dengan minimnya informasi antara petani terhadap Bank Syariah Mandiri menjadikan petani kurang berminat mengajukan pembiayaan. Akibatnya, sektor pertanian menjadi kurang atraktif bagi Bank Syariah Mandiri.⁶⁷

Penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian masih kurang *matching-* dengan *nature* usaha di Bank Syariah Mandiri. Usaha di sektor pertanian bersifat musiman, dan hasil produksi

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ M. Fadli Azmi, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri, wawancara di Medan, tanggal 16 Januari 2017

dan harga yang tidak menentu. Sementara transaksi di perbankan dilakukan secara reguler, misalnya untuk pembayaran angsuran dilakukan per bulan.⁶⁸

Selain itu, pihak Bank Syariah Mandiri belum berani menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian secara optimal. Mereka memiliki pemahaman bahwa pertanian merupakan suatu sektor usaha sangat berisiko (*high risk*), tergantung musim, jaminan harga yang tidak pasti dan sebagainya.⁶⁹

Perhatian sektor Bank Syariah Mandiri masih terfokus pada agribisnis modern dan perkebunan besar dan belum menyentuh para petani menengah dan kecil. Para bankir masih *under estimate* terhadap pelaku usaha pertanian lainnya dan menganggap kelompok ini tidak dapat menawarkan margin keuntungan yang memadai bagi Bank Syariah Mandiri. Karakter perbankan sebagai entitas bisnis cenderung 'mengikuti' dunia usaha. Maksudnya, jika dunia usaha pertanian tidak menarik bagi perbankan, cukup sulit bagi sektor perbankan untuk datang dan memberikan perhatian bagi sektor pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi di lain pihak, tidak sedikit usaha agribisnis atau sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit skala besar menjadi magnet tersendiri bagi Bank Syariah Mandiri, karena prospek keuntungan yang besar.⁷⁰

d. Efektivitas Pembiayaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Sawit

Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan petani kelapa sawit. Dapat dilihat pada tabel 4.1

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

No.	Nama Nasabah	Jumlah Pembiayaan	Pendapatan Sebelum/tahun	Pendapatan Sesudah/tahun	Persentase Kenaikan
1	Nasabah X	1,000,000,000	1,785,425,550	2,433,407,950	36%
2	Nasabah Y	275,000,000	222,000,000	237,600,000	15.80%
3	Nasabah Z	200,000,000	182,400,000	206,901,493	13.40%

Tabel 4.1 Persentase Pendapatan Setelah Pembiayaan

Pada tabel 4.1, bisa dilihat pembiayaan yang diterima oleh petani kelapa sawit sudah cukup tinggi. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri dapat dipergunakan oleh petani kelapa sawit untuk biaya eksploitasi, baik pemeliharaan, panen, dan pengangkutan agar dapat berjalan dengan lancar. Dalam melaksanakan aktivitasnya, setiap usaha tidak akan terlepas dari kebutuhan modal. Modal menjadi penting untuk kelangsungan hidup usaha termasuk sektor kelapa sawit.

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan bersih yang diterima oleh petani kelapa sawit sudah baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan.

Pembiayaan Bank Syariah Mandiri sudah efektif karena mampu mengoptimalkan produksi kelapa sawit juga memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan petani kelapa sawit dan pengembalian kewajiban dalam kondisi lancar.

e. Mekanisme Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Mandiri pada Sektor Kelapa Sawit

Prosedur pembiayaan yaitu mengikuti tahapan proses pembiayaan mulai dari pengumpulan data, verifikasi data, pengajuan MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan), keputusan pembiayaan, realisasi keputusan, pemantauan dan pelunasan.⁷¹

Pada pengumpulan data, bank harus memperhatikan sektor ekonomi yang memiliki

⁷¹ *Ibid.*

prospek bisnis yang baik sehingga posisi bank tergolong aman dan menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut.⁷² Penghimpunan informasi dapat dilakukan dengan *ta'aruf* dan wawancara. *Ta'aruf* adalah proses awal pengenalan antara dengan nasabah melalui proses wawancara. Dalam wawancara tersebut akan diperoleh data-data sementara tentang kondisi nasabah pemohon pembiayaan dan memeriksa ulang kembali kelengkapan dan kebenaran data-data yang diperoleh.⁷³

Dalam proses wawancara tersebut akan terlihat juga sikap atau komitmen serta konsistensi keabsahan data yang disampaikan secara tertulis oleh nasabah. Data tertulis tersebut sebagai acuan, sebab banyak terjadi perbedaan akurasi data atau pemalsuan antara data tertulis dengan data hasil wawancara. Dari data standar itu pula para *Account Manager* (AM) bisa mengambil kesimpulan secara tepat apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan atau ditolak.⁷⁴

Secara garis besar dalam wawancara tersebut harus mencakup kelengkapan data pemohon, data-data pendukung, pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon.⁷⁵

Selanjutnya, memperoleh data nasabah melalui proses mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon nasabah yang disajikan dalam bentuk laporan kunjungan (*call report*), biasanya disebut solitasi.⁷⁶

Dalam menjalankan solitasi, AM harus mempunyai nilai standar tentang informasi yang

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

akan diperoleh, sehingga diperoleh data yang objektif, tidak bersifat relatif dan tidak spekulatif.

Adapun standar informasi yang dimaksud adalah :⁷⁷

- a. Informasi umum tentang eksistensi usaha itu sendiri
- b. Informasi kebutuhan nasabah
- c. Informasi kemampuan pembayaran kewajiban (*repayment*)
 - 1) Informasi mengenai kemampuan membayar kewajiban (*repayment*) dari hasil produksi itu sendiri, cara pemasaran, , strategi penjualan yang diterapkan, hasil penjualan tertinggi yang pernah dicapai, piutang dagang.
 - 2) Adanya alternatif sumber pengembalian yang lain.
- d. Informasi jaminan
 - 1) Jenis jaminan yang diajukan, nilai pasar jaminan, pemilik jaminan dan *marketable*.
 - 2) Kemudahan memonitor jaminan, termasuk lokasi jaminan itu berada serta jenis dan sifat fisika kimianya.
 - 3) Status hukum jaminan tersebut termasuk asuransi.
- e. Informasi hubungan dengan bank lain yang pernah memberikan pembiayaan (kredit) sebelumnya dan tujuan penggunaan pembiayaan. Dari informasi di atas akan terlihat struktur pendanaan operasi perusahaan. Bila nasabah telah berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan maka dapat dilengkapi dengan persyaratan kredit, jangka waktu kredit, agunan kredit dan kondisi calon nasabah pada lembaga keuangan perbankan yang lama. Dan hasil informasi dibandingkan dengan posisi di neraca dan rugi laba

Setelah pengumpulan data, pihak bank melakukan laporan kunjungan (*call report/on the spot* (OTS)) adalah laporan kunjungan ke lokasi usaha nasabah yang dibuat oleh AM dan

⁷⁷ *Ibid.*

diketahui atasannya, sebagai dasar untuk proses pembiayaan selanjutnya.

Selanjutnya, proses analisis pembiayaan. Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan ditentukan oleh kelayakan usaha nasabah sebagai sumber utama pelunasan pembiayaan (*first way out*) dan kelayakan agunan sebagai sumber pelunasan kedua (*second way out*) apabila sumber pelunasan yang utama tidak berjalan.

Keputusan pembiayaan melalui keputusan komite. Kemudian realisasi keputusan dengan penandatanganan akad pembiayaan dan jaminan. Setelah itu pemantauan usaha dan pembayaran kewajiban sampai pelunasan hingga pelepasan jaminan.

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan pertanian kelapa sawit adalah akad *murabahah*. Pada aplikasinya Bank Syariah Mandiri menggunakan media '*akad wakalah*' dengan memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang tersebut.

B. Pembahasan Penelitian

Hasil kajian Syukur *et al.*, menemukan bahwa jika dilihat dari aspek kualitas persyaratan, maka penyediaan agunan merupakan persyaratan paling sulit dipenuhi oleh pelaku usaha pertanian. Apalagi jika agunan yang dipersyaratkan harus berupa sertifikat tanah atau bangunan. Pada kenyataannya masih sangat terbatas pelaku usaha pertanian yang memiliki bukti kepemilikan tanah/bangunan berupa sertifikat. Dengan demikian akan sangat sulit bagi pelaku usaha pertanian untuk akses terhadap sumber kredit formal.⁷⁸

Selain hambatan berupa penerapan persyaratan yang ketat, secara umum kendala penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian adalah kurang *matching*-nya karakteristik usaha di sektor ini dengan *nature* usaha di perbankan. Usaha di sektor pertanian bersifat musiman (pendapatan petani juga musiman), petani merasa takut ketika melakukan peminjaman kepada

⁷⁸ Syukur, M., *et. al.*, *Kajian Pembiayaan Pertanian Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri di Perdesaan*, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2002)

sebuah lembaga keuangan. Hasil produksi dan harga yang tidak menentu menyebabkan petani tidak dapat memastikan apakah pada saat jatuh tempo pembayaran mereka mampu untuk melunasi hutang mereka. Sementara karakteristik usaha perbankan tidak terkait dengan musim. Transaksi di perbankan dilakukan secara reguler, misalnya untuk pembayaran angsuran dilakukan per bulan. Dengan karakteristik bisnis perbankan seperti ini, maka semua biaya, baik untuk operasional, gaji karyawan dan pemeliharaan juga harus dikeluarkan secara reguler (bulanan) sehingga untuk menjaga keseimbangan *cash flow* harus ada pendapatan yang diperoleh secara reguler. Kondisi ini mengakibatkan sektor pertanian cenderung tidak dijadikan prioritas dalam penyaluran pembiayaan oleh perbankan.⁷⁹

Menurut Nurmanaf, dkk., beberapa kendala yang dihadapi dalam pendanaan sektor pertanian dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya⁸⁰:

- a. Jangkauan pelayanan kredit/pembiayaan masih sangat terbatas. Bahkan untuk bank tertentu masih ada yang hanya melayani masyarakat sekitar kota kabupaten/kota kecamatan.
- b. Persyaratan aplikasi/pengajuan kredit masih sangat *rigid* sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses pinjaman yang disalurkan. Terlebih lagi untuk sektor pertanian yang dipandang sangat *risky* pihak perbankan cenderung lebih berhati-hati lagi.
- c. Jangka waktu proses pencairan kredit relatif lama karena harus ada *screening* dan *checking*.
- d. Biaya transaksi dianggap masih terlalu besar.
- e. Persyaratan agunan dengan menetapkan barang yang telah memiliki kekuatan hukum

⁷⁹ Anonim, *Pemetaan Komoditas Pertanian Unggulan Jawa Barat serta Potensi Pembiayaan Perbankan Syariah untuk Pengembangannya*, (Kerjasama Kantor Bank Indonesia Bandung dengan Pusat Analisis Sosial Ekono, 2006)

⁸⁰ Nurmanaf, *et. al.*, *Analisis Sistem Pebiayaian Mikro dalam Mendukung Usaha Pertanian di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2006)

formal (sertifikat/BPKB) dirasa masih cukup memberatkan.

f. Penilaian terhadap nilai agunan cenderung sangat *underestimate* sehingga sangat berpengaruh terhadap nilai pinjaman yang diberikan.

Sementara itu, menurut Aviliani, beberapa kendala yang dihadapi dalam pendanaan sektor pertanian dapat dilihat dari berbagai segi⁸¹:

a. Risiko *on Farm*, yaitu yang terjadi dalam budidaya tanaman seperti ketersediaan pupuk, bibit, pestisida dan teknik budidaya.

b. Risiko Pemasaran, yaitu risiko yang terjadi karena kesulitan pemasaran produk pertanian sehingga menimbulkan risiko penurunan harga atau tidak terserapnya produk hasil pertanian

c. Masalah Sosial, masalah penjarahan atau ketimpangan sosial antara petani dengan perusahaan

d. Risiko status lahan, status tanah menyulitkan sebagai agunan kredit, masalah sertifikasi tanah prosesnya lama dengan *timing* pemberian kredit menjadi berkepanjangan

e. Dominasi usaha mikro kecil yang memiliki kelemahan dalam manajemen, pembukuan, distribusi pemasaran, permodalan dan agunan.

f. Ketergantungan kepada industri hilir sangat tinggi yang mengakibatkan *bargaining power* (daya tawar) petani rendah,

g. Keterbatasan kompetensi bank di bidang pertanian. Jumlah bank yang mempunyai kompetensi di sektor pertanian masih terbatas, sehingga belum semua bank mempunyai keberanian membiayai sektor pertanian.

⁸¹ Aviliani, *Kebijakan Perbankan dalam Sektor Agribisnis. Makalah disampaikan pada Round Table Discussion: Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian*. (Jakarta: Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis, FEM-IPB, 2009)

Dari sisi perbankan, rendahnya alokasi kredit disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:⁸²

Dari sisi perbankan, rendahnya alokasi kredit disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:⁸³

- a. Perbankan memandang sektor pertanian sangat *risky* sehingga sangat hati-hati dalam pemberian pembiayaan
- b. Pihak perbankan ada yang trauma dengan pengalaman KUT yang kurang baik
- c. Banyak perbankan yang tidak mempunyai cukup pengalaman menyalurkan kredit di sektor pertanian
- d. Dominasi usaha mikro-kecil memiliki kelemahan dalam manajemen dan pembukuan (*nonbankable*)
- e. Adanya risiko sosial dan status lahan yang kurang kondusif bagi perbankan.

Sementara di sisi lain, pelaku usaha pertanian (petani, pedagang saprodi/output pertanian) memiliki *image* bahwa meminjam modal di perbankan sangat kompleks prosedurnya, sehingga kurang terdorong untuk mengajukan kredit. Penyediaan agunan merupakan persyaratan yang paling sulit untuk dipenuhi oleh pelaku usaha pertanian. Perbedaan *nature* usaha, minimnya informasi serta belum optimalnya komunikasi antara sektor pertanian dengan perbankan juga menjadi kendala yang tidak kalah penting untuk dicarikan solusinya yang tentu saja harus menguntungkan kedua pihak.⁸⁴

Hasil studi menunjukkan bahwa minimnya pembiayaan di sektor pertanian oleh perbankan disebabkan beberapa hal, diantaranya: risiko pembiayaan yang tinggi, persyaratan yang ketat

⁸² Ashari, *Peran Perbankan Nasional Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Di Indonesia* (Bogor:Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2009), h.25

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

dalam pengajuan kredit, kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala mikro-kecil, serta keterbatasan kompetensi perbankan di bidang pertanian.⁸⁵

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor pertanian, diantaranya dengan memperbesar alokasi anggaran ke sektor pertanian, peningkatan efektivitas dana APBN, mendorong perbankan lebih ekspansif dalam pembiayaan pertanian, maupun merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian.⁸⁶

Walaupun pemerintah telah berupaya untuk mencoba mengembangkan pembiayaan pertanian ini secara serius, akan tetapi permasalahan klasik yang membelit skema pembiayaan pertanian belum dapat diurai secara baik, sehingga perlu dirumuskan jalan keluarnya yang efektif.⁸⁷

Belum optimalnya dukungan perbankan dalam alokasi pembiayaan ke sektor pertanian merupakan tantangan bagi pemerintah, pelaku usaha pertanian dan pihak perbankan untuk dicari solusinya. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam regulasi seyogyanya memiliki keberanian untuk membuat terobosan kebijakan di sektor perbankan yang lebih propertanian dan usaha mikro kecil di perdesaan. Terkait dengan masih sulitnya pelaku usaha pertanian (terutama petani) akibat kendala persyaratan *collateral*, pemerintah dapat membantu dengan fasilitasi program sertifikasi lahan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu juga menyusun buku pintar komoditas yang membahas secara lengkap dan proporsional “*a to z*” terkait dengan komoditas pertanian. Hal ini dimaksudkan agar dengan buku tersebut dapat dijadikan panduan dalam pengembangan bisnis bank, misalnya bagi *account officer* (AO) dan pengambil keputusan

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Arifin B., Mengatasi Kesulitan Pembiayaan Sektor Pertanian <http://barifimultiply.com/journal/item/17> (diakses 23 April 2017)

di perbankan ketika melakukan persetujuan pembiayaan.⁸⁸

Pelaku usaha di sektor pertanian juga harus membuat terobosan dan langkah-langkah kongkret agar sektor pertanian “laku jual” dan memang layak diberikan dukungan dana yang memadai. Profesionalitas dan integritas moral pelaku usaha pertanian harus menjadi prioritas untuk segera dibenahi. Ibaratnya uang akan mengalir ke tempat yang paling menguntungkan masih menjadi praktisi perbankan. Artinya perbankan akan secara otomatis mengalokasikan dana pada usaha-usaha yang memiliki ekspektasi paling menguntungkan.⁸⁹

Pelaku perbankan diharapkan juga lebih proporsional dan tidak apriori terhadap pembiayaan di sektor pertanian. Dengan luasnya cakupan usaha, komoditas, skala usaha, maupun karakteristik pelaku di sektor pertanian diharapkan memunculkan upaya-upaya terobosan dalam penyusunan skim pembiayaan sesuai dengan pelaku usaha pertanian yang beragam tersebut. Untuk itu, perlu upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan pemahaman terhadap sektor pertanian yang lebih baik bagi petugas analisis pembiayaan/*account officer* di setiap perbankan. Pemerintah dapat memfasilitasi dengan mengadakan seminar/*workshop/training* bagi *banker* tentang segala aspek terkait dengan sektor pertanian beserta prospek pembiayaan di sektor tersebut.⁹⁰

Implikasi dari penggunaan akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam skim *murabahah* fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara

⁸⁸ Ashari, *Peran Perbankan*, h. 25

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, h. 26

dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.⁹¹

Dengan adanya akad *wakalah* tersebut bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad *wakalah* kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang haram.⁹²

Selain itu dalam aplikasinya akad jual beli *murabahah* dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁹³ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1.⁹⁴

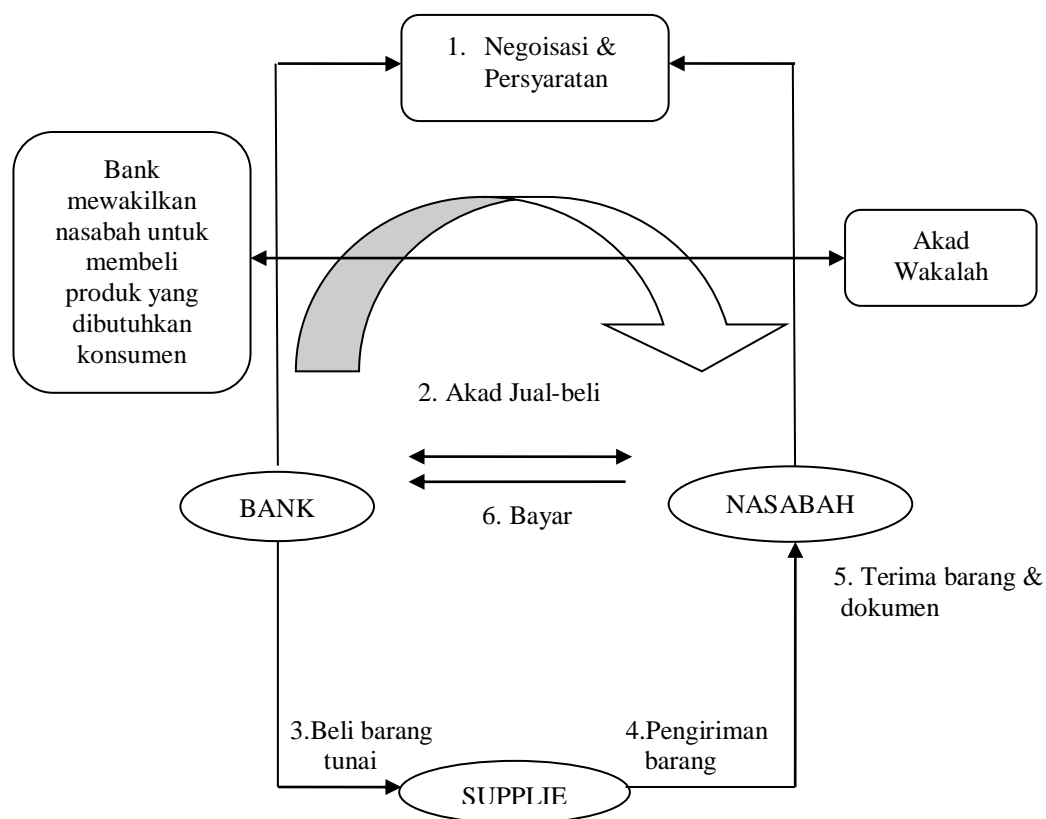
⁹¹ *Ibid.*

⁹² Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*, Jebi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, h. 157

⁹³ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

⁹⁴ Ahmad Jaelani, “Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Murabahah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015) h.53

Skema Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Mandiri pada Sektor Kelapa Sawit



Gambar 4.1 Skema *Murabahah wal Wakalah*

Wikuana menyatakan bahwa modal menjadi penting, karena dengan modal perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dan melakukan pengembangan atau perluasan usaha. Modal kerja yang efektif menjadi sangat penting untuk kelangsungan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.⁹⁵

Sama halnya dengan Kasmir yang menyatakan bahwa kredit secara positif dapat meningkatkan pendapatan, karena pemberian kredit dapat menambah modal usaha.⁹⁶ Maharani

⁹⁵ Wikuana dan Panji Sedana, *Buku Ajar Manajemen Keuangan*. (Denpasar: Universitas Udayana, 2001)

⁹⁶ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi I. Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2010)

menyatakan bahwa pendapatan suatu usaha tergantung dari modal yang dimiliki. Jika modal besar maka hasil produksi tinggi, sehingga pendapatan yang didapat juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika modal kecil maka hasil produksi rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Modal yang cukup akan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha dan masyarakat pada umumnya.⁹⁷

⁹⁷ Maharani Tejasari, *“Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”*, (Skripsi, Ekonomi Dan Manajemen Institute Pertanian Bogor, 2008).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tantangan-tantangan dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah:

- a. Minimnya informasi yang diperoleh petani tentang Bank Syariah Mandiri menjadikan petani kurang berminat mengajukan pembiayaan. Akibatnya, sektor pertanian menjadi kurang atraktif bagi Bank Syariah Mandiri.
- b. Penyediaan agunan merupakan persyaratan paling sulit dipenuhi oleh pelaku usaha pertanian karena agunan yang dipersyaratkan harus berupa sertifikat tanah atau bangunan sedangkan pelaku usaha pertanian yang memiliki bukti kepemilikan tanah/bangunan berupa sertifikat masih jarang.
- c. Penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian masih kurang *matching-* dengan *nature* usaha di perbankan. Usaha di sektor pertanian bersifat musiman, dan hasil produksi dan harga yang tidak menentu. Sementara transaksi di perbankan dilakukan secara reguler, misalnya untuk pembayaran angsuran dilakukan per bulan.
- d. Bank Syariah Mandiri belum berani menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian secara optimal pertanian merupakan suatu sektor usaha karena sangat berisiko (*high risk*), tergantung musim, jaminan harga yang tidak pasti dan sebagainya.
- e. Perhatian sektor Bank Syariah Mandiri masih terfokus pada agribisnis modern dan perkebunan besar serta belum menyentuh para petani menengah dan kecil.
- f. Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri kepada petani kelapa sawit sudah efektif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan memiliki pengaruh positif terhadap nasabah, terbukti dengan meningkatnya jumlah pendapatan petani kelapa

- g. sawit. Selain itu juga dapat dilihat dengan bertambahnya luas lahan yang dimiliki petani kelapa sawit.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri perlu melakukan sosialisasi agar petani tidak minim terhadap informasi dengan cara menyebarkan selebaran/brosur produk kepada warga khususnya lokasi perkebunan kelapa sawit atau memasang pamflet, melakukan pendekatan kepada pimpinan daerah setempat, dan mengajak warga untuk dapat berkumpul. Selanjutnya, pihak Bank Syariah Mandiri dapat mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri baik yang bersifat sosial maupun bisnis.
2. Bank Syariah Mandiri perlu merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik perkebunan kelapa sawit.
3. Kebijakan pemerintah terhadap fasilitas program sertifikasi lahan secara berkelanjutan sebaiknya diaplikasikan guna membantu petani dalam mengatasi kendala persyaratan *collateral*.
4. Bank Syariah Mandiri sebaiknya lebih ekspansif dan proporsional terhadap pembiayaan di sektor pertanian. Mengoptimalkan dukungannya perbankan dalam alokasi pembiayaan ke sektor kelapa sawit.
5. Tidak hanya memberikan pembiayaan untuk sektor agribisnis dalam skala besar tetapi juga harus bisa memberikan pembiayaan agribisnis ini kepada petani-petani langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Afrida, Yenti. *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*. Jebi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016

Al- Qur'anul Karim

Anonim. *Pemetaan Komoditas Pertanian Unggulan Jawa Barat serta Potensi Pembiayaan Perbankan Syariah untuk Pengembangannya*. Kerjasama Kantor Bank Indonesia Bandung dengan Pusat Analisis Sosial Ekono, 2006

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Ar-rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Gema Insani, 1999

Ashari. *Peran Perbankan Nasional Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Di Indonesia*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2009

Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra, 2008

Aviliani. *Kebijakan Perbankan dalam Sektor Agribisnis. Makalah disampaikan pada Round Table Discussion: Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian*. Jakarta: Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis, FEM-IPB, 2009

Azmi, M. Fadli. *Consumer Banking Relationship Manager Bank Syariah Mandiri*, wawancara di Medan, tanggal 16 Januari 2017

Bintari dan Suprihatin. *Ekonomi dan Koperasi*. Bandung: Ganesa Exact. 1982

Boediono. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2002

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Chapra, Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2000

DEP. DIK. NAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ke IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2008

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE, 201

- Hikmat, Mahi M. *Metodologi Penelitian dalam Perspektik Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Husaeni, Martani dan Hari Lubis. *Teori Organisas*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial, 1987
- Idris, Muhammad “ Sistem Bagi Hasil Pada Pertanian Karet Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Roburan Lombang Madina”. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SU, 2016
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2015
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Group, 2011
- Jaelani, Ahmad. “Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Murabahah*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi I. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2010
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Maharani Tejasari. “Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Skripsi, Ekonomi Dan Manajemen Institute Pertanian Bogor, 2008
- Mankiw. *Principle of Economic*. Jakarta: Salemba Empat, 2004
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996
- Mudrajat, Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga, 2003
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Nurmanaf, et. al. *Analisis Sistem Pebiayaian Mikro dalam Mendukung Usaha Pertanian di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2006
- Nurrohmah, Siti. “Analisis Produksi dan Pendapatan Petani Sawah di Kecamatan Mowilka Kabupoaten Konawe Selatan”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, 2016

- Pratomo, Eko P. *Berwisata Kedunia Investasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Riningsih. “Pengaruh Modal Kerja Dan Satuan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pada Industri Kecil Pengrajin Genteng Di Desa Karangasem Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan”. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Semarang, 2005
- Rochaety, Ety dan Ratih Tresnati. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Siagian, Sondang P. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985
- Suardjono. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE, 2005
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008¹
- Sujadi. *Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*. Jakarta: CV. Masagung, 1990
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Susiana. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Malang*. Skripsi, UIN Malang, 2010
- Syukur, M., et. al. *Kajian Pembiayaan Pertanian Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri di Perdesaan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2002
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
- Wiksuana dan Panji Sedana. *Buku Ajar Manajemen Keuangan*. Denpasar: Universitas Udayana, 2001
- Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press, 2009
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara 2006
- Ariyanti, Eni. *Sumatera Utara Salah Satu Penghasil Terbesar Kelapa Sawit Indonesia*, <http://beritadiera.co.id>, (Diakses pada 2 Februari 2017)
- B. Arifin. *Mengatasi Kesulitan Pembiayaan Sektor Pertanian* <http://barifimultiply.com/journal/item/17> (diakses 23 April 2017)
- Bank Syariah Komit Biayai Sektor Agribisnis*, <https://www.syariahamandiri.co.id> (Diakses pada 1 Mei 2017)

BI Perlu Ada Skim Khusus Untuk Kredit Pertanian, <http://www.carikredit.com>, (Diakses pada 27 April 2017)

BSM Tambah Pertanian Rp500 M, <https://www.syariahmandiri.co.id> (Diakses pada 1 Mei 2017)

Luas Tanaman dan Produksi Kelapa Sawit Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten, 2014, <http://sumut.bps.go.id>, (Diakses pada 20 Desember 2016)

Marganti, Dupien Asido. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan*, <http://www.pascasarjanapwd.co.id>, (Diakses pada 18 Desember 2016)

OJK dorong bank syariah beri pembiayaan pertanian, keuangan.kontan.co.id (Diakses pada 1 Mei 2017)

Pembiayaan Syariah ke Pertanian dan Perkebunan Perlu Disubsidi, <https://www.syariahmandiri.co.id> (Diakses pada 1 Mei 2017)

Pendapatan Menurut Hukum Islam, <http://www.referensimakalah.com> (Diakses pada 18 Maret 2017)

Pengertian Agribisnis Menurut Para Ahli, <http://www.nasrulartaanatobratnisji.co.id>, (Diakses pada 30 Maret 2017)

Pengertian Sistem Agribisnis, <http://www.klikbbm.co.id>, (Diakses tanggal 30 Maret 2017)

Profil Bank Syariah Mandiri, <https://www.syariahmandiri.co.id> (Diakses 2 Februari 2017)

Rahmadi, Ryan. *Peranan Sector Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia*, <http://www.ryanrahmadi99.co.id>, (Diakses pada 3 Februari 2017)

Thata. *Kumpulan Teori Efektifitas*, <http://yunitaardha.co.id>, (Diakses pada 11 oktober 2016)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : HOTNASARI MUTIARA SIREGAR
2. NIM : 26133011
3. Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 12 Maret 1995
4. Pekerjaan : MAHASISWI
5. Alamat : Jl. DR. K. H. Zubeir Ahmad I Gg. Nikmat No. 20

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan MIN Sihadabuan Padangsidempuan Berijazah tahun 2007
2. Tamatan MTsN Model Padangsidempuan Berijazah tahun 2010
3. Tamatan MAN 1 Padangsidempuan Berijazah tahun 2013
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Berijazah Tahun 2017

WAWANCARA

1. Bagaimana PT. Bank Syariah Mandiri menilai sektor perkebunan kelapa sawit saat ini ?
2. Sejak tahun berapa pembiayaan perkebunan kelapa sawit ini dijalankan oleh Bank Mandiri Syariah?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan yang digunakan PT. Bank Syariah Mandiri terhadap perkebunan kelapa sawit?
4. Apakah akad yang digunakan dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit dan bagaimana mekanismenya?
5. Bagaimana tantangan dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit pada PT. Bank Syariah Mandiri?
6. Bagaimana karakteristik petani yang bisa mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri?
7. Bagaimana strategi yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit ini dan adakah strategi khusus?
8. Bagaimana standart PT. Bank Syariah Mandiri dalam mengukur tingkat efektifitas pembiayaan perkebunan kelapa sawit?
9. Bagaimana kelancaran pembayaran nasabah terhadap kewajibannya ?
10. Bagaimana efektifitas pembiayaan perkebunan kelapa sawit PT. Bank Syariah Mandiri selama ini?

HASIL WAWANCARA

1. Pembiayaan ke sektor agribisnis yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri diakui tidak agresif. Pasalnya, penyaluran pembiayaan ke pertanian dinilai cukup sulit dan kurang menarik. Bank Syariah Mandiri tidak begitu banyak menyalurkan pembiayaan di sektor agribisnis dibandingkan pembiayaan lainnya. Pada sektor agribisnis, sejauh ini Bank Syariah Mandiri hanya melakukan pembiayaan di bidang kelapa sawit saja karena trendnya yang lebih bagus di bandingkan sektor agribisnis lainnya.
2. Pembiayaan sektor kelapa sawit ini dijalankan sejak tahun 1999. Untuk KCP Krakatau sendiri pembiayaan sektor kelapa sawit dijalankan sejak tahun 2011.
3. Prosedur pembiayaan yang digunakan PT. Bank Syariah Mandiri terhadap perkebunan kelapa sawit sama halnya dengan prosedur pembiayaan pada sektor lainnya yaitu mengikuti tahapan proses pembiayaan mulai dari pengumpulan data, verifikasi data, pengajuan MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan), keputusan pembiayaan, realisasi keputusan, pemantauan dan pelunasan.

LANGKAH	KEGIATAN
PENGUMPULAN DATA	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inisiasi ▶ Solisitasi
VERIFIKASI DATA	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kunjungan setempat. ▶ Informasi Bank (Bank checking). ▶ Informasi dari pembeli/pemasok/bowheer/pesaing
PENGAJUAN MUP	<p>Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP):</p> <p>Analisa Pembiayaan (Analisa Kualitatif dan Kuantitatif)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Analisa Jaminan. ▶ Analisa Risiko. ▶ Evaluasi Kebutuhan Dana ▶ Penetapan Struktur Fasilitas ▶ Pengajuan MUP ke KPP.
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN	<p>Keputusan Pembiayaan oleh Komite</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rapat Komite

	<ul style="list-style-type: none"> ► Sirkulasi.
REALISASI KEPUTUSAN	Pelaksanaan Keputusan KPP : <ul style="list-style-type: none"> ► Penyampaian SPP ke Nasabah ► Dokumentasi dan Administrasi ► Penandatanganan Akad Pembiayaan dan Jaminan
PEMANTAUAN	Pemantauan Pembiayaan : <ul style="list-style-type: none"> ► Pemantauan Usaha Nasabah ► Pemantauan Jaminan ► Pembinaan Nasabah ► Pemantauan Pembayaran Nasabah
PELUNASAN	Pelunasan Pembiayaan : <ul style="list-style-type: none"> ► Bukti Pelunasan. ► Pelepasan jaminan

LANGKAH	KEGIATAN
INISIASI	<ul style="list-style-type: none"> ► Tahapan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan Target Market ▪ Penetapan Sektor Bisnis ► Kriteria Nasabah : Ekstern & Intern
SOLISITASI	<ul style="list-style-type: none"> ► Informasi Umum ► Informasi Kebutuhan Nasabah ► Informasi Kemampuan Membayar Kembali ► Informasi Barang Jaminan ► Informasi hubungan Perbankan
LAPORAN KUNJUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> ► Verifikasi Data dan Informasi ► Laporan Kunjungan Setempat ► Berita Acara Plotting dan Taksasi Jaminan

4. Akad yang digunakan dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit adalah akad murabahah wal akalah. Akadnya yaitu:

Bank syariah memberikan kuasa terhadap nasabah dengan menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad *wakalah* kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah. Sesuai ketentuan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000

tanggal 1 April 2000 yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

5. Tantangan-tantangan dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit pada PT. Bank Syariah Mandiri diantaranya:
 - a. Minimnya informasi dan akses petani terhadap lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan.
 - b. Penyediaan agunan merupakan persyaratan paling sulit dipenuhi oleh pelaku usaha pertanian karena agunan yang dipersyaratkan harus berupa sertifikat tanah atau bangunan sedangkan pelaku usaha pertanian yang memiliki bukti kepemilikan tanah/bangunan berupa sertifikat masih jarang. Dengan demikian akan sangat sulit bagi pelaku usaha pertanian untuk akses terhadap sumber kredit formal.
 - c. Penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian masih kurang *matching-* dengan *nature* usaha di perbankan. Usaha di sektor pertanian bersifat musiman, dan hasil produksi dan harga yang tidak menentu. Sementara transaksi di perbankan dilakukan secara reguler, misalnya untuk pembayaran angsuran dilakukan per bulan.
 - d. Bank Syariah Mandiri belum berani menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian secara optimal pertanian merupakan suatu sektor usaha karena sangat berisiko (*high risk*), tergantung musim, jaminan harga yang tidak pasti dan sebagainya.
 - e. Perhatian sektor Bank Syariah Mandiri masih terfokus pada agribisnis modern dan perkebunan besar dan belum menyentuh para petani menengah dan kecil.
6. Karakteristik petani yang bisa mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri adalah petani yang memenuhi persyaratan yang diminta pihak Bank Syariah Mandiri, mulai dari terpenuhinya persyaratan administrasi, bebas BI *Checking*, dan jaminan yang diberikan mengcover total pembiayaan, serta memiliki izin lahan resmi.

7. Tidak ada strategi khusus yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit ini.
8. Standart PT. Bank Syariah Mandiri dalam mengukur tingkat efektifitas pembiayaan perkebunan kelapa sawit dinilai dari kelancaran nasabah terhadap kewajibannya.
9. Kelancaran nasabah terhadap kewajibannya dinilai baik.
10. Efektifitas pembiayaan perkebunan kelapa sawit PT. Bank Syariah Mandiri selama ini cukup baik karena data NPF (*non performing loan*) Bank Syariah Mandiri saat ini masih <5%.

